

ABSTRAK

Judul Tesis	:	Pemanfaatan Aset Barang Milik Daerah Untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan Dalam Presfektif Negara Hukum
Nama	:	Tonny Ferdinanto
NPM	:	21160012
Kata Kunci	:	Barang Milik Daerah, Negara Hukum, PIK
Isi Abstrak	:	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mendapat langkah hukum yang akan diambil oleh PT PLN dalam menjalankan tugas pemerintah mewujudkan Proyek pembangunan infrastuktur ketenagalistrikan (PIK) serta untuk mengetahui dan mengkaji desain hukum yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah dalam merespon adanya pertentangan antara peraturan perundang-undangan antara Peraturan Daerah Provinsi dengan Undang-undang serta Peraturan Pemerintah terkait dengan Penggunaan Tanah oleh PT PLN sebagai Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk kepentingan umum.</p> <p>Penelitian ini termasuk dalam pendekatan penelitian yuridis normatif (<i>normative law research</i>) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Untuk memperoleh data sekunder dilakukan penulusuran studi kepustakaan guna memperoleh data yang akan digunakan sebagai landasan teori untuk selanjutnya akan dianalisis pokok-pokok permasalahan yang ada dalam penelitian ini.</p> <p>Hasil penelitian Pemanfaatan Aset Barang Milik Daerah untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan dalam prespektif Negara Hukum Pancasila menunjukkan bahwa pertama, adanya pertentangan antara Peraturan Daerah Provinsi dengan Undang-Undang (<i>Lex superior derogat legi inferiori</i>) sehingga asas hukum di mana peraturan yang bersifat lebih tinggi dapat menyampingkan peraturan yang tingkatnya lebih rendah.</p> <p>Kedua, berdasarkan hierarki Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 dan agar pemanfaat Aset Barang Milik Daerah dapat digunakan untuk kepentingan umum terutama Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan (PIK) maka Peraturan Daerah Provinsi dapat dirubah atau dilakukan <i>Judicial Review</i> ke Mahkamah Konstitusi oleh pemangku kepentingan dalam hal ini adalah PT PLN.</p>

ABSTRAK

- Judul Thesis : Utilization of Regional Property Assets for Electricity Infrastructure Development in the Perspective of the Rule of Law
- Nama : Tonny Ferdinanto
- NPM : 21160012
- Kata Kunci : Regional Property, State Law, PIK
- Isi Abstrak** :
- This study aims to obtain legal steps to be taken by PT PLN in carrying out the government's duties to realize the Electricity Infrastructure Development Project (PIK) as well as to find out and examine legal designs that need to be considered by the government in responding to conflicts between laws and regulations between Provincial Regulations with the Laws and Government Regulations related to the Use of Land by PT PLN as an Electricity Supply Business for the public interest.
- This research is included in the normative juridical research approach (normative law research) using normative case studies in the form of products of legal behavior. Which uses a type of library research and the data used in this study is secondary data. To obtain secondary data, a literature study was carried out in order to obtain data that would be used as a theoretical basis for further analysis of the main problems in this study.
- The results of the research on the Utilization of Regional Property Assets for Electricity Infrastructure Development in the perspective of the State Law indicated. There was a conflict between Provincial Regulations and the Law (Lex superior derogat legi inferiori) so that the legal principle where higher regulations can override regulations the lower level.
- Then, based on the hierarchy of laws and regulations regulated in Law no. 12 of 2011 and so that the use of Regional Property Assets can be used for the public interest, especially the Development of Electricity Infrastructure (PIK), the Provincial Regulations can be amended or a Judicial Review is carried out to the Constitutional Court by the stakeholder in this case is PT PLN.